



LAPORAN PENELITIAN :

**ASPEK-ASPEK HUKUM KOORDINASI KELEMBAGAAN
DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PANTAI UTARA JAWA TENGAH
SECARA TERPADU**

**LEGAL ASPECTS OF INSTITUTIONAL COORDINATION ON THE INTEGRATED
NORTH COASTAL ZONE OF CENTRAL JAVA MANAGEMENT**

=====

OLEH :

**DADANG SISWANTO, SH
L TRI SETYOWANTO, SH.M Hum
S U P A R N O , SH.M Hum
JOKO SETIONO , SH
ELFIA FARIDHA , SH**

**Dibiayai Oleh Dana DIK Rutin Universitas Diponegoro, Sesuai
Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Tanggal 4 Agustus 1997**

Nomor : 3157/PT09.H2/N/1997

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

1997

LAPORAN PENELITIAN

-
1. a. Judul Penelitian : "Aspek-Aspek Hukum Koordinasi Kelembagaan Dalam Pengelolaan Wilayah Pantai Utara Jawa Tengah Secara Terpadu "
- b. Macam Penelitian : Pengembangan
- c. Kategori : III
-

2. Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Dadang Siswanto, SH
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Pangkat/Gol / NIP : III C/Lektor Muda/ 131 696 463
- d. Jabatan Fungsional : Dosen
- e. Fakultas/ Jurusan : Hukum / Hukum Internasional
- f. Universitas : Diponegoro-Semarang
- g. Bidang Ilmu : Hukum Lingkungan Laut
-

3. Jumlah Tim Peneliti : 5 personil

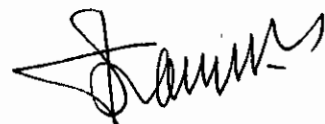
4. Lokasi Penelitian : Jawa Tengah

5. Jangka Waktu : 6 bulan

6. Biaya Yg Diperlukan : Rp. 2.625.000,-

Semarang, Des 1998

Ketua



Dadang Siswanto, SH

NIP. 131 696 463



Menyetujui:
Ketua Lembaga Penelitian

DR.dr Satoto

NIP. 130 368 071

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur atas kemurahan Tuhan Yang Maha Esa, maka dapat selesailah penelitian dengan judul "Aspek-Aspek Hukum Koordinasi Kelembagaan Dalam Pengelolaan Wilayah Pantai Utara Jawa Tengah Secara Terpadu "

Penelitian ini dapat terselenggara berkat suntikan Dana dari DIK RUTIN Universitas Diponegoro Semarang, tahun Anggaran 1997/1998, dengan surat perjanjian Pelaksanaan Tugas Penelitian Nomor: 3157/PT09.H2?N/1997 tanggal 4 Agustus 1997.

Bersama ini kami team peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bappeda Dati I Propinsi Jawa Tengah
2. Kanwil Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Tengah
3. Bappeda Dati II Kabupaten Jepara
4. Dinas Perikanan
5. Kanwil Parpostel
6. Kanwil Perhutani

Instansi-instansi tersebut telah memberikan informasi-informasi yang mendukung penelitian ini, baik diberikan secara formal atau secara informal.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan penelitian ini, sehingga mengharapkan saran-saran dari para pembaca sekalian.

Harapan penulis semoga hasil penelitian yang sederhana ini dapat menambah pengetahuan baik bagi kalangan praktisi maupun bagi akademik.

Semarang, Des 1997
Peneliti

Dadang Siswanto, SH

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | 1 |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | IV |
| ABSTRAKSI PENELITIAN | VI |
| | |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A.Latar Belakang Penelitian | 1 |
| B.Perumusan Masalah | 5 |
| C.Sistematika Uraian | 6 |
| | |
| BAB II : TINJAUAN PUSTAKA | 7 |
| | |
| BAB III : TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN | 17 |
| A.Tujuan Penelitian | 17 |
| B.Manfaat Penelitian | 17 |
| | |
| BAB IV : METODE PENELITIAN | 19 |
| 1.Metode Penetapan populasi | 19 |
| 2.Metode penentuan sampel..... | 19 |
| 3.Metode Pengumpulan data | 20 |
| 4.Teknik Pengolahan data | 20 |
| | |
| BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 22 |
| A.Gambaran Umum | 22 |
| B.Pengelolaan Lingkungan Wilayah Pantai Utara Jawa Tengah Dalam Konsep Pengelolaan Lingkung- an Wilayah Pantai Secara Terpadu | 24 |
| C.Dasar Hukum Koordinasi Kelembagaan Dalam Penge- lolaan Wilayah Pantai Utara Jawa Tengah Secara Terpadu | 31 |
| D. Hambatan-Hambatan yang Timbul Dalam Pelaksa- naan Pengelolaan Wilayah Pantai Utara Jawa - Tengah Secara Terpadu | 37 |
| | |
| BAB VI : PENUTUP | 39 |
| A.Kesimpulan | 39 |
| B.Saran-Saran..... | 40 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRACT

" LEGAL ASPECTS OF INSTITUTIONAL COORDINATION ON THE
INTEGRATED NORTH COASTAL ZONE OF CENTRAL JAVA MANAGEMENT

(Dadang Siswanto, Suparno, L Tri Setyowanto, Joko Setiono,
Elfia Faridha)

=====

The utilization of resources at the North Coastal of Central Java recently uncreases, such at Fishing activities at the shallow water, tranportation activities, tourism and the multi function activities.

The utilization "Integrated Coastal Zone Management" concept is relevant to the conservation of the sea as a separate activities or in connection with the utilization of other coastal.

The Research is to find information on the utilization Integrated Coastal Zone Managment at the North Coastel of the Central Java.

The method approach is Yuridis Sociologis. In The Fact, is still takes places overlapping intergency in connection with the utililazation of the resources due to the interest of the intitution respectively.

The emerging problems is as follow.:

1. Program and coastal development project based under sektoral approach ;
2. Ego sektoral

The cooperation between Pemda Dati I Jawa Tengah and the relevant instutition base on :

1. Ground-Act 1945, article 18, 1957
2. Local Government Fundamentals, Act no 5, 1974
3. Space Stucture Act no 14 , 1992
4. The Local Regulation of Central Java Province no 2, 1994 concern The Basic concept of Regional Development of Central Java Province.

4. National Coordination meeting on the living Environment
management and sustainable Development concern the the
National of Policy and Strategi on Development Long Time
II (Years 1994/1995 - 2019/2020)

A B T R A K S I I

"ASPEK-ASPEK HUKUM KOORDINASI KELEMBAGAAN DALAM PENGELOLAAN
WILAYAH PANTAI UTARA JAWA TENGAH SECARA TERPADU

(Dadang Siswanto, Suparno, L Tri Setyowanto, Joko S,

Elfia Farida)

Pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pantai utara Jawa Tengah dewasa ini semakin meningkat, seperti kegiatan penangkapan ikan di perairan dangkal, kegiatan transportasi, agro industri, pusat rekreasi dan pariwisata serta kegiatan-kegiatan multi fungsi.

Penggunaan konsep "Integrated Coastal Zone Management " berkaitan erat dengan kegiatan perlindungan dan pemeliharaan kelestarian laut atau lingkungan laut sebagai suatu bentuk kegiatan tersendiri maupun dalam hubungan dengan kegiatan-kegiatan pemanfaatan wilayah pantai lainnya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penggunaan konsep "Integrated Coastal Zone Management " dalam pengelolaan wilayah Pantai Utara Jawa Tengah.

Metode Pendekatan adalah *Muridis Sociologis*

Dalam kenyataan menunjukkan masih adanya konflik dari berbagai kepentingan dalam pemanfaatan sumber daya alam wilayah pantai Jawa Tengah, yang didasarkan pada kepentingan masing-masing instansi yang terkait dalam pengelolaan wilayah pantai.

Masalah-masalah tersebut timbul sebagai akibat dari :

1. Program dan proyek pengembangan sumber daya wilayah pantai dan laut pantai di dasarkan pada pendekatan secara sektoral
2. Ego sektoral

Kerjasama antar Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan instansi terkait, didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. UUD 1945 pasal 18
2. UU no 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

3. UU no 14 tahun 1992 tentang Tata Ruang
4. Peraturan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah no 2 th 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Dati I Jawa Tengah tahun 1994/1995-1998/1999
5. Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan Berkelanjutan tahun 1994 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan Jangka Panjang kedua (1994/1995-2019/2020).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Secara geografis wilayah pantai utara Jawa Tengah terbentang dengan batas-batas dari kabupaten Brebes di sebelah barat sampai kabupaten Rembang di sebelah timur, yang mencakup wilayah 10 kabupaten. Pantai utara Jawa Tengah sebagai bagian dari pantai utara Jawa, menghadap ke laut Jawa, yang merupakan perairan kepulauan berdasarkan UU no 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Sebagai perairan kepulauan, maka laut Jawa merupakan bagian integral dari wilayah daratan Indonesia, sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Indonesia (Pasal 2 ayat 2 UU no 6 tahun 1996).

Sudah sejak dahulu wilayah pesisir dan pantai (coastal zone), termasuk laut pantai (Coastal sea) yaitu bagian laut yang berbatasan dengan dan dekat pantai, merupakan wilayah sebagai sumber bahan makanan bagi rakyat terutama kekayaan biologi laut dan protein ikan laut.

Di Pantai utara Jawa Tengah kegiatan perikanan rakyat menggunakan alat tangkap atau perangkap yang sederhana/ tradisional. Sedangkan kegiatan nelayan ekonomi lemah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan menggunakan kapal penangkap ikan sederhana yang dapat mencapai jarak cukup jauh, meskipun waktu melautnya tidak lama.

Perkembangan fungsi wilayah pantai seperti sekarang ini, wilayah pantai bukan hanya menjadi tempat pengambilan sumber bahan makanan saja, tetapi telah berkembang secara multi fungsi.

Dalam rangka pembangunan ekonomi, wilayah pantai digunakan pula untuk kegiatan-kegiatan industri, transportasi, agro-industri, budidaya laut (aquaculture), pusat rekreasi dan

pariwisata, pemukiman dan pembuangan sampah, serta kegiatan lainnya seperti kegiatan perlindungan dan pemeliharaan ketestarian lingkungan laut.

Pengembangan sumber daya alam wilayah pesisir dan pantai dalam pembangunan jangka panjang pertama (PJP I) untuk menunjang pembangunan ekonomi di Indonesia telah menyebabkan penurunan kualitas lingkungannya. Dengan demikian telah menimbulkan masalah polusi, perusakan fisik dari hutan bakau, terumbu karang, pesisir dan habitat-habitatnya, serta penangkapan ikan yang berlebihan pada tingkat yang membahayakan kapasitas laut dan daerah pesisir (Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, 1996 : Bab 10-11).

Usaha perikanan selama ini lebih banyak berorientasi pada perikanan pesisir dan pantai, yang mencakup sebagian besar daerah Indonesia bagian barat dan sebagian Indonesia bagian Timur. Penangkapan ikan di daerah pesisir dan pantai dan usaha kultivasi dewasa ini, lebih banyak dilakukan disepanjang pesisir pantai utara Jawa dan Sumatera dengan kota besar sebaga pasar utamanya. Bahkan telah disinyalir bahwa tingkat eksploitasi di wilayah pesisir Jawa dan Sumatera telah mencapai tingkat maksimum (JL.Narere , 1988 :73)

Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam wilayah pantai utara Jawa Tengah dewasa ini semakin meningkat seperti kegiatan penangkapan ikan di perairan dangkal, perusakan komunitas terumbu karang (coral reefs) untuk keperluan industri teraso, budidaya udang dan lain-lainnya. Dalam kenyataannya wilayah pantai sepanjang Jepara, Demak, Pati, Rembang dan Pekalongan di wilayah pantai utara Jawa Tengah dewasa ini cukup memprihatikan sebagai akibat tindakan pengambilan karang-karang yang tidak terkendali. Demikian pula telah terjadi konflik berbagai kepentingan didalam pemanfaatan sumber daya alam wilayah pantai utara Jawa Tengah yang di -

dasarkan pada berbagai kepentingan dari masing-masing instansi terkait sebagai akibat kewenang pada pengelolaan wilayah pantai di Jawa Tengah.

Masalah-masalah tersebut timbul karena pada umumnya program dan proyek pengembangan sumber daya alam wilayah pantai dan laut pantai didasarkan pada pendekatan sektoral. Demikian pula lemahnya koordinasi dan kerjasama diantara badan-badan sektoral dan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, telah mengakibatkan terjadinya tumpang tindih (Overlap) dan duplikasi mengenai usaha-usaha di bidang pengumpulan data, pelaksanaan proyek dan pemberlakuan peraturan. Hal ini ditunjang oleh kenyataan bahwa para perencana, pengambil keputusan dan pemakai sumber daya kelautan di Indonesia pada umumnya menganggap sumber daya wilayah pantai seperti ikan dan hutan bakau yang dapat diperbarui adalah kurang berharga dibandingkan dengan sumber daya yang tidak dapat diperbarui seperti minyak dan gas bumi serta mineral-mineral lainnya.

Dalam hal ini sebenarnya telah terdapat perangkat hukum yang berupa Undang-undang dan peraturan lainnya di Indonesia mengenai pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut secara berkesinambungan, Undang-undang tersebut diantaranya UU no 4 Tahun 1992 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sekarang telah diperbarui dengan UU no 23 tahun 1997, UU no 9 Tahun 1985 tentang Perikanan dan Peraturan pelaksanaannya. Dalam konsepsi idealnya, pengelolaan wilayah pantai dan laut pantai memang harus dilaksanakan secara terpadu (integrated coastal Zone management) yang dimaksud agar pemanfaatan dan pengambilan kekayaan alam hayati dan nabati dapat dilakukan secara berkesinambungan dan agar tetap dapat terus terpeliharanya lingkungan wilayah pantai dan pantai secara lestari.

Penggunaan konsep "integrated coastal Zone Management " berkaitan erat dengan kegiatan perlindungan dan pemeliharaan kelestarian laut atau lingkungan laut, sebagai suatu bentuk kegiatan tersendiri maupun kegiatan dalam hubungannya dengan kegiatan-kegiatan pemanfaatan sumber daya wilayah pantai lainnya. Semua kegiatan pemanfaatan wilayah pantai memerlukan kewenangan pemerintah Daerah Tingkat I sebagai mitra Departemen atau instansi Pusat yang melaksanakannya di sektor masing-masing.

Di bidang perikanan misalnya, pemerintah Daerah Tingkat I mempunyai kewenangan untuk mengurus perikanan rakyat dan perikanan pantai, sehingga memerlukan pula kewenangan untuk melakukan pengelolaan wilayah pantai dan laut pantai dalam rangka kepentingan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Dalam hal ini Pemerintah Daerah memang berkepentingan dalam usaha pengelolaan wilayah pantai yang berkaitan dengan hajat hidup penduduk pantai di wilayahnya.

Konsep pengelolaan wilayah pantai secara terpadu tersebut memerlukan koordinasi yang mapan secara lintas sektoral yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian terpadu disini adalah keterpaduan antara penggunaan wilayah pantai dan laut pantai oleh Dinas yang berada di bawah kewenangan instansi pusat dengan Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah khususnya. Demikian pula dapat berarti keterpaduan antara instansi-instansi Pusat yang mempunyai kewenangan atau kepentingan di daerah, dengan Pemerintah Daerah Tingkat I yang mempunyai kewenangan mengurus wilayah pantai dan laut pantai yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku (Mochtar Kusumaatmadja, 1996 : 18).

Pengelolaan wilayah pantai dan laut pantai utara Jawa Tengah selama ini memang telah memperlihatkan kerjasama yang cukup baik antara Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan instansi terkait, seperti dengan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Perhubungan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan Departemen Pariwisata Pos dan Telekomunikasi.

Dalam kenyataannya kerjasama antara Pemerintah Daerah - Tingkat I Propinsi Jawa Tengah dengan Departemen atau instansi terkait tersebut belum diikuti dengan adanya koordinasi pengelolaan wilayah pantai utara Jawa Tengah , yang didasarkan pada mekanisme yang jelas. Sehingga berdasarkan pada uraian-urain tersebut di muka, maka perlu dilakukan penelitian untuk membahas studi ilmu hukum mengenai koordinasi kelembagaan dalam pengelolaan wilayah pantai utara Jawa Tengah secara terpadu.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian seperti tersebut di muka, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Sampai sejauh manakah pengelolaan wilayah pantai Utara Jawa Tengah menggunakan konsep "Pengelolaan Wilayah Pantai Secara Terpadu " (Integrated Coastal Zone Management) ?
2. Apakah yang menjadi landasan hukum atau dasar hukum yang digunakan dalam mengkoordinasikan kegiatan pengelolaan wilayah pantai utara Jawa Tengah secara terpadu ?
3. Faktor-Faktor apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kerjasama dan koordinasi pengelolaan wilayah pantai utara Jawa Tengah secara terpadu ?
4. Bagaimanakah upaya-upaya secara yuridis yang dilakukan untuk mewujudkan dan meningkatkan mekanisme koordinasi dalam pengelolaan wilayah pantai utara Jawa Tengah secara terpadu ?

C. Sistematika Uraian

Sistematika penulisan laporan hasil penelitian ini terdiri dari : Bab I Pendahuluan yang berisi tentang sub A. Latar Belakang Penelitian Sub B. Perumusan Masalah dan Sub C. Sistematika Uraian. Bab II Tinjauan Pustaka. Bab III Tujuan dan Manfaat Penelitian. Bab IV Metode Penelitian. Bab V Hasil dan Pembahasan. Bab VI Kesimpulan dan Saran.